



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis.....	5
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 RENCANA STRATEGIS	8
2.1.1 Indikator Kinerja Utama	10
2.1.2 Perjanjian Kinerja	13
2.1.3 Rencana Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Capaian Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan.....	21
3.1.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	53
3.1.3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	66
3.1.4 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	80
3.2 Realisasi Anggaran	90
3.3 Capaian Prestasi Dan Penghargaan.....	94
BAB IV PENUTUP.....	96

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Payakumbuh ini merupakan Gambaran tingkat pencapaian kinerja Bappeda sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu laporan LKjIP ini juga memberikan Gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Upaya pencapaian target yang ditetapkan. Selanjutnya LKjIP akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Bappeda di tahun-tahun berikutnya,

Akhir kata, semoga LKjIP yang telah disusun dapat bermanfaat bagi Bappeda khususnya dan umumnya bagi perencanaan dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, 26 Januari 2026
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL,MM
NIP. 196803071990091001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LKJIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebuah laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan yang memuat pencapaian sasaran strategis suatu instansi pemerintah berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi perbandingan antara rencana dan hasil, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renja Perubahan Tahun 2025, Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Bappeda Kota Payakumbuh yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Payakumbuh. Bappeda Kota Payakumbuh merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kota Payakumbuh melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu:

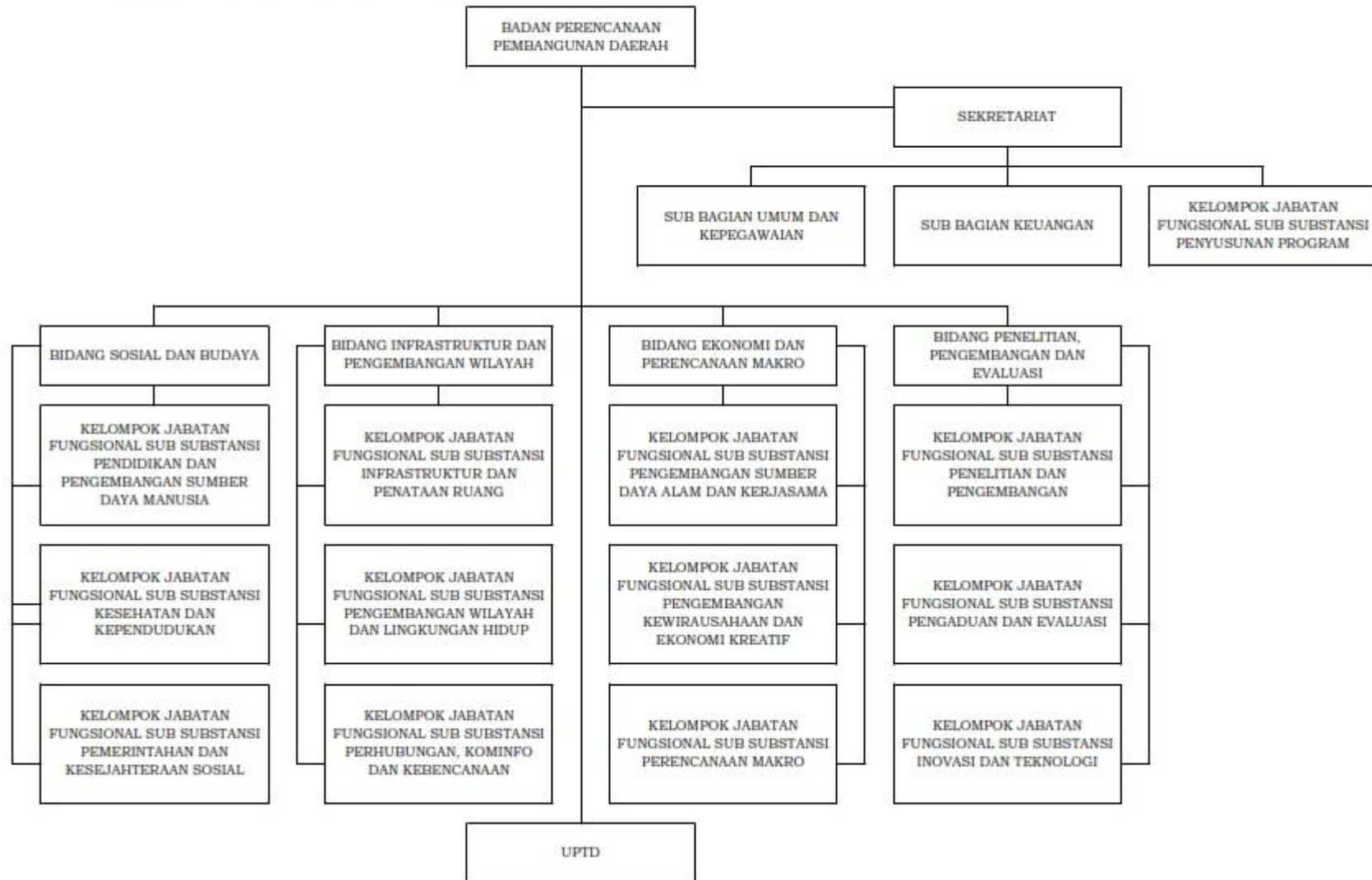
- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa susunan Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh, terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Program.
- c. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan dan Kependudukan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perhubungan, Komunikasi Informatika dan Kebencanaan.
- e. Bidang Ekonomi dan Perencanaan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Makro;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inovasi dan Teknologi.
- g. UPTD

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 63 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sampai dengan Desember 2025, Jumlah pegawai yang bekerja di BAPPEDA Kota Payakumbuh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang tenaga PNS, 4 (empat) orang tenaga PPPK, 5 (lima) orang Pegawai Non PNS, sehingga jumlah sumber daya manusia di Bappeda sejumlah 44 orang.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan pada tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan.
- c. Belum optimalnya peran riset dan inovasi.

Pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah dan 2 dokumen penelitian. Dokumen perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan dokumen penelitian yang dihasilkan berupa:

1. Fenomena Peningkatan Minat terhadap Sekolah Swasta dibandingkan Sekolah Negeri
2. Strategi Pengembangan Pusat Perkotaan Kota Payakumbuh (Rekomendasi Arsitektur).

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
- i. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB ini memuat:

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

- A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dokumen target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- F. Analisis atas efisiensi pengurangan sumber daya
- G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- H. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapi dengan foto

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis baik daerah maupun nasional.

Rencana Strategis merupakan alat bantu untuk memacu dan memicu pimpinan dan seluruh staf dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan organisasi untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi.

Bappeda Kota Payakumbuh mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, rencana Strategis dimaksud dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sedangkan kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kota Payakumbuh harus sejalan dengan pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2025-2029 antara lain:

- a. Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- d. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
- e. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh telah menetapkan lima tujuan utama. Dari kelima tujuan tersebut, sebagai fokus intervensi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tujuan ketiga “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel”. Sehingga ditetapkan Tujuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan”

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbangan		Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,00	26,01	26,02	26,03	26,04	26,05
			Indeks inovasi daerah	54,85	55,15	55,25	55,50	55,95	56,05
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
3		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
4		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	86,00	87,00	88,00	90,00	92,00	93,00

Sumber: Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

2.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Bappeda tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Nomor: 065/96/Bappeda-Ko/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITEIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbangan		Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021: tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman utama evaluasi AKIP	Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB)	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB)	
			Indeks inovasi daerah	Nilai	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang diperkuat oleh berbagai Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) yang diterbitkan setiap tahun dan Pedoman Indeks Inovasi Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan setiap tahun	Kementrian Dalam Negeri	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
2.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014: tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). - PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021: tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	LHE Inspektorat Kota Payakumbuh	Inspektorat Kota Payakumbuh	
3.		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021: tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor}_i \times \text{Bobot}_i)}{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i}$ Keterangan : - Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) - Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan - Aspek penilaian meliputi, misalnya: ➤ Kelengkapan dokumen ➤ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➤ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➤ Tingkat partisipasi masyarakat ➤ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➤ Ketepatan waktu penyusunan	Bappeda Kota Payakumbuh	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4.		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Persentase		$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$ Keterangan : - Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. - Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).	Bappeda Kota Payakumbuh	

Sumber: SK IKU BAPPEDA Tahun 2025-2029

2.1.2 Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 ada 3 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota Payakumbuh dengan Walikota Payakumbuh
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Kepala Bappeda;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang:

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,00
		Indeks Inovasi Daerah	54,85
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	85,00
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00
4	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	86,00

Sumber: Perjanjian Kinerja eselon II Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

2.1.3 Rencana Kinerja

Bappeda Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel

- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 3) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota
 - c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - d) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

- b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- c) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan realisasi dan capaian kinerja suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja Bappeda Kota Payakumbuh dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus .

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}}$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang krusial, di mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalamnya dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan utama yang berakar pada prinsip manajemen kinerja sektor publik, sebagai berikut:

1. Sebagai dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tolok Ukur: Tujuan Renstra adalah sasaran jangka menengah yang ingin dicapai. Perjanjian Kinerja berfokus pada target tahunan yang diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diturunkan langsung dari tujuan dan sasaran Renstra. Dengan memasukkannya ke PK, target jangka menengah tersebut terpecah menjadi langkah-langkah konkret;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan komitmen: Perjanjian Kinerja adalah bentuk komitmen antara penerima amanah (misalnya, Kepala Dinas) dan pemberi amanah (Kepala Daerah) untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi: Tujuan Renstra 2025-2029 menjadi pedoman, sementara PK menjadi instrumen untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan pada tahun tersebut berhasil mendekati target 5 tahunan;

4. Menjamin Konsistensi dengan RPJMD 2025-2029: Renstra 2025-2029 harus selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029. Perjanjian Kinerja memastikan bahwa operasionalisasi tahunan (Rencana Kerja/Renja) tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai target RPJMD;
5. Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja: Tujuan yang tertera dalam PK memastikan bahwa anggaran yang digunakan (RKA) benar-benar ditujukan untuk pencapaian hasil, bukan sekadar menyerap anggaran. Ini menciptakan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

Tujuan Renstra adalah "apa" yang akan dicapai dalam 5 tahun, sedangkan Perjanjian Kinerja adalah "komitmen tahunan" untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga keduanya tidak terpisahkan dalam manajemen kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2025			Kategori	Target Akhir Renstra 2025-2029	Capaian Tahun 2025 terhadap renstra 2025-2029 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	25,04	26,00	25,11	96,58	Sangat Tinggi	26,04	96,43
2	Indeks Inovasi Daerah	54,62	54,85	51,50	93,89	Sangat Tinggi	55,95	92,05
3	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	82,65	85,00	83,00	97,65	Sangat Tinggi	87,00	95,40
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	90,00	80,31	89,23	Tinggi	92,00	87,29
5	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	NA	86,00	100,00	116,28	Sangat Tinggi	92,00	108,70

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025, Kepmedagri Nomor 400.10.11-6097 tahun 2025, Inspektorat Kota Payakumbuh dan Kemenpan RB Nomor B/119/AA.05/2024

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan sangat tinggi dan capaian kinerja dua

sasaran pada Tahun 2025 adalah kategori sangat tinggi dan satu sasaran kategori tinggi, dengan rata-rata persentase mencapai 98,73% berdasarkan hasil pengukuran atas 2 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran.

Sedangkan realisasai target kinerja berdasarkan perubahan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,00	25,11	96,58
		Indeks Inovasi Daerah	54,85	51,50	93,89
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	85,00	83,00	97,65
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00	80,31	89,23
4	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	86,00	100,00	116,28

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025, Kepmedagri Nomor 400.10.11-6097 tahun 2025, Inspektorat Kota Payakumbuh dan Kemenpan RB Nomor B/119/AA.05/2024

Analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dilakukan penyesuaian substansi perencanaan kinerja dengan memasukkan unsur tujuan selain sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Capaian Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan

Capaian tujuan meningkatnya Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

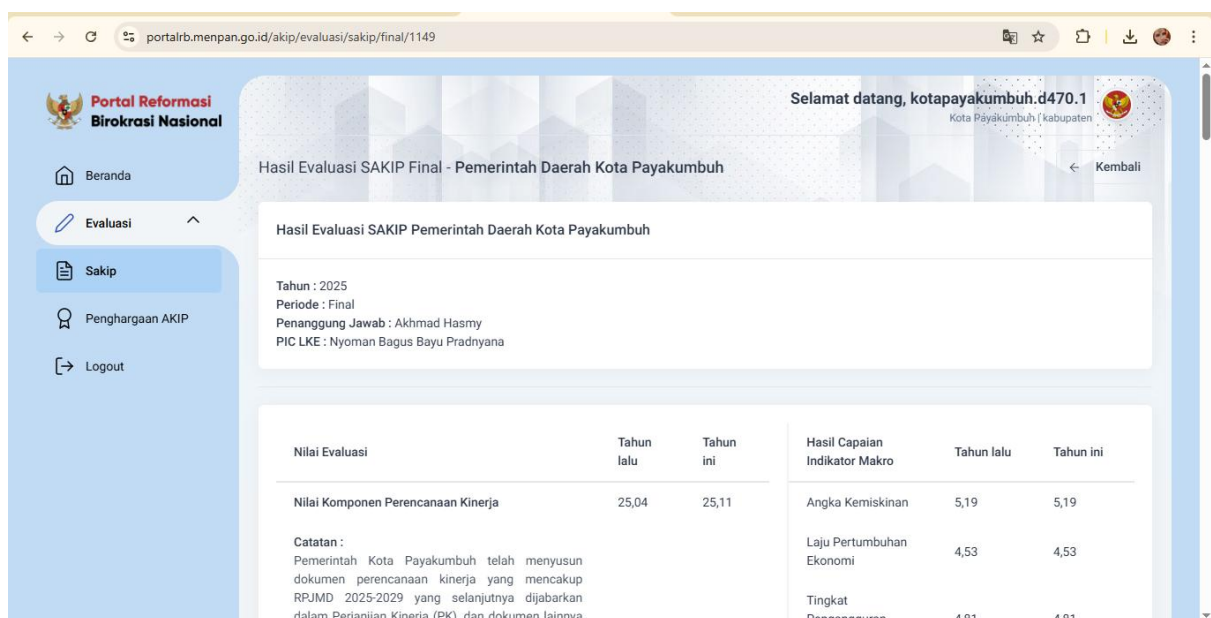
Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26,00	25,11	96,58

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 26,00 Kota Payakumbuh tahun 2025 memperoleh nilai 25,11 atau sebesar 96,58%. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja menilai kualitas dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) yang berorientasi hasil, berjenjang, dan selaras dengan tujuan instansi. Komponen ini menitikberatkan pada keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dokumen untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Evaluasi ini merupakan bagian dari empat komponen utama SAKIP.

Gambar 3.1
LHE SAKIP KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025



Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini	Hasil Capaian Indikator Makro	Tahun lalu	Tahun ini
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	25,04	25,11	Angka Kemiskinan	5,19	5,19
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,53	4,53
			Tingkat Pengangguran	4,81	4,81

Catatan :
Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya



Nilai <u>Evaluasi</u>	<u>Tahun</u> <u>lalu</u>	<u>Tahun</u> <u>ini</u>
Nilai <u>Komponen Perencanaan Kinerja</u>	25,04	25,11
<u>Catatan :</u> Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya baik pada tingkat Pemda maupun PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut: 1. <u>Penjenjangan/cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu, juga belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan CSF atas pencapaian kinerja. Hal ini ditunjukkan pada indikator kinerja pada level eselon II yang merupakan kumpulan dari target kinerja Kepala Bagian, serta masih terdapat perbedaan target pada eselon II dan tingkat Kepala Bagian. Seperti contoh pada PK Dinas Komunikasi dan Informatika;</u>		

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja tahun 2025 adalah 25,11

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini

Tabel 3.5
Perbandingan Realisai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	24,73	24,84	25,04	26,00	25,11	96,58

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan setiap tahun terjadi peningkatan. Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah Kota Payakumbuh untuk terus fokus pada kualitas dokumen

perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya dijabarkan dalam perjanjian kinerja.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Dokumen Jangka Menengah

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Persentase Capaian Realisasi 2025 (%)	Persentase Terhadap Target Akhir Renstra 2029
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26,00	25,11	26,04	96,58	96,43

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa capaian Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 96,58%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai 96,43%

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional dan beberapa daerah lainnya di Indonesia

Belum ada perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dengan target nasional dan daerah lainnya di Indonesia.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai target Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Bappeda Kota Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah–langkah untuk meningkatkan capaian kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,00	25,11	96,58	Telah Menyusun dokumen perencanaan RPJMD yang selaras dengan Renstra	

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh 2025

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kinerja						Persentase
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26,00	25,11	96,58%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7.270.643.094	6.338.336.459	87,18%
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	667.788.100	646.854.516	96,87%
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	555.523.000	447.338.036	80,53%
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	270.408.400	270.267.861	99,95%
							96,58%			
Tingkat efisiensi						8,69%				
Tingkat efektivitas						109,89				

Dari Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan, didukung oleh semua program Bappeda. Capaian Kinerja dari indikator Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 96,58% sedangkan capaian keuangan dari semua program yang mendukungnya yaitu 87,89%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 8,69%, sedangkan tingkat efektivitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 109.89%.

G. Analisis program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja, adalah sebagai berikut:

Tabel.3.9
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Nilai IKM	89	Nilai	88,53	Nilai	99,47%	7.270.643.094	6.338.336.459	87,18%
			Nilai IKM Bappeda	89	Nilai	88,53	Nilai	99,47%			
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	102.954.450	100.882.130	97,99%
			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	6	dokumen	100,00%	14.999.000	14.056.117	93,71%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6	Laporan	100,00%	87.955.450	86.826.013	98,72%
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95	Persentase	87,89	Persentase	92,52%	5.429.549.712	4.785.375.331	88,14%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	orang/bulan	37	orang/bulan	100,00%	5.121.728.912	4.504.586.331	87,95%
	2	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	307.820.800	280.789.000	91,22%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	43.000.000	42.957.000	99,90%
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43	paket	43	paket	100,00%	43.000.000	42.957.000	99,90%
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	245.004.850	239.404.598	97,71%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	paket	8	paket	100,00%	4.804.000	4.771.890	99,33%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	paket	10	paket	100,00%	30.106.000	27.188.649	90,31%
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	3	paket	100,00%	18.978.000	17.049.155	89,84%
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	19.938.450	19.800.000	99,31%
	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	laporan	1	laporan	100,00%	4.404.500	3.974.670	90,24%
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1	laporan	100,00%	154.774.000	154.695.853	99,95%
	7	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	11.999.900	11.924.381	99,37%
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80	Persentase	80	Persentase	100,00%	783.802.000	619.693.000	79,06%
	1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	1	unit	100,00%	599.334.000	446.000.000	74,42%
	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	1	unit	100,00%	36.759.000	30.056.500	81,77%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	unit	20	unit	100,00%	37.074.000	34.521.000	93,11%
	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	unit	14	unit	100,00%	110.635.000	109.115.500	98,63%
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	222.676.082	209.927.046	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	1	laporan	100,00%	106.584.664	96.279.391	90,33%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	1	laporan	100,00%	116.091.418	113.647.655	97,89%
	VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80	Persentase	80	Persentase	100,00%	443.656.000	340.097.354	76,66%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	100,00%	42.950.000	39.052.226	90,92%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	unit	25	unit	100,00%	290.600.000	201.584.664	69,37%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	unit	14	unit	63,64%	26.750.000	16.180.464	60,49%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100,00%	83.356.000	83.280.000	99,91%
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	667.788.100	646.854.516	96,87%
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	587.975.700	566.350.713	96,32%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	VIII	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	464.774.950	449.101.613	96,63%
			Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	19,5	Persentase	20,48	Persentase	105,03%			
	1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	berita acara	2	berita acara	100,00%	33.293.000	31.067.194	93,31%
	2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	berita acara	2	berita acara	100,00%	68.908.750	65.963.208	95,73%
	3	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	235	usulan	235	usulan	100,00%	20.999.000	20.218.698	96,28%
	4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	341.574.200	331.852.513	97,15%
	IX	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	98,5	Persentase	98,5	Persentase	100,00%	11.429.500	11.336.278	99,18%
	1	Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	buku	1	buku	100,00%	11.429.500	11.336.278	99,18%
	X	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	97,5	Persentase	97,5	Persentase	100,00%	100.809.750	96.636.350	95,86%
			Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	93,55	Persentase	93,55	Persentase	100,00%			
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	laporan	1	laporan	100,00%	15.770.750	15.741.869	99,82%
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	laporan	2	laporan	100,00%	85.039.000	80.894.481	95,13%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	XI	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	71,43	Persentase	71,43	Persentase	100,00%	90.773.900	89.780.275	98,91%
			Tingkat akseibilitas data	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	90.773.900	89.780.275	98,91%
C	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	555.523.000	447.338.036	80,53%
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	246.301.000	245.416.190	99,64%
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	dokumen	16	dokumen	100,00%	21.307.450	21.049.282	98,79%
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	208.191.800	207.764.499	99,79%
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	1	laporan	1	laporan	100,00%	16.801.750	16.602.409	98,81%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Daerah Bidang Pembangunan Manusia	pada Bidang Pembangunan Manusia								
	XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	101.916.550	8.654.699	8,49%
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7	laporan	7	laporan	100,00%	96.430.750	3.229.585	3,35%
	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7	laporan	7	laporan	100,00%	5.485.800	5.425.114	98,89%
	XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	207.305.450	193.267.147	93,23%
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	laporan	8	laporan	100,00%	69.514.050	69.095.165	99,40%
	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	laporan	8	laporan	100,00%	41.023.900	38.500.544	93,85%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	laporan	8	laporan	100,00%	96.767.500	85.671.438	88,53%
D	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	75	Persentase	75	Persentase	100,00%	270.408.400	270.267.861	99,95%
	XV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	99.999.700	99.972.489	99,97%
	1	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek - aspek sosial	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	99.999.700	99.972.489	99,97%
	XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	99.999.700	99.973.023	99,97%
	1	Penelitian dan Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	99.999.700	99.973.023	99,97%
	XVII	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	70.409.000	70.322.349	99,88%
	1	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	laporan	1	laporan	100,00%	70.409.000	70.322.349	99,88%
JUMLAH									8.764.362.594	7.702.796.872	87,89%

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

- a. Nilai IKM. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 89,00 dengan realisasi 88,53 dan capaian kinerja 99,47%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 (enam) dokumen perencanaan dan pelayanan publik yaitu Renja perubahan 2025, Renja 2026, Survey Kepuasan Masyarakat 2 semester Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 dan SPIP dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp14.999.000 dan terealisasi sebesar Rp14.056.117 atau 93,71%.
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 laporan kinerja perangkat daerah yaitu laporan triwulan I, II, III, dan IV, LKPJ, dan LKJIP. dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp87.955.450 dan terealisasi sebesar Rp 86.826.013 atau 98,72%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Subkegiatan ini berupa pembayaran gaji, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan target 37 orang ASN dan terealisasi sebanyak 37 orang ASN. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp5.121.728.912 dan terealisasi sebesar Rp4.504.586.331 atau 87,95 %.
 - 2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Subkegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan pada Bappeda dengan target 1 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan terealisasi 1

dokumen dengan capaian 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp307.820.800 dan terealisasi sebesar Rp280.789.000 atau 91,22 %

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas bagi ASN Bappeda dengan target 43 paket pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan dan terealisasi sebanyak 43 paket dengan capaian 100% dilaksanakan alokasi anggaran Rp43.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.42.957.000 atau 99,90%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Subkegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Payakumbuh, dengan target sebanyak 8 paket dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.804.000 dan terealisasi sebesar Rp4.771.890 atau 99,33%.

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Subkegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor berupa air galon isi ulang, hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor dengan target 10 paket Bahan logistik kantor yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.106.000, dan terealisasi sebesar Rp27.188.649 atau 90,31%

- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak (Amplop dinas, kop surat logo, memo, kop dinas, map kop dinas, lembar disposisi, kwitansi NCR, BKU NCR, SPP/SPM), penggandaan dan penjilidan dan cetak spanduk dengan target sebanyak 3 paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.978.000, dan terealisasi sebesar Rp17.049.155 atau 89,84%

- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Subkegiatan ini berupa penyediaan jenis surat kabar nasional yaitu Kompas dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.938.450 dan terealisasi sebesar Rp19.800.000 atau 99,31%

5) Fasilitas Kunjungan Tamu

Subkegiatan ini berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan fasilitas kunjungan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.404.500 dan terealisasi sebesar Rp3.974.670 atau 90,24%

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 1 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.774.000 dan terealisasi sebesar Rp 154.695.853 atau 99,95%

7) Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Subkegiatan ini berupa pengelolaan website Bappeda, dengan target 1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.999.900 dan terealisasi sebesar Rp11.924.381 atau 99,37%.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:

1) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Subkegiatan ini berupa 1 unit kendaraan dinas jabatan dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp599.334.000 dan terealisasi Rp446.000.000 atau 74,42%

2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 unit kendaraan dinas roda 2 operasional dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp36.759.000 dan terealisasi Rp30.056.500 atau 81,77%

3) Pengadaan Mebel

Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 buah lemari arsip dua pintu, 1 buah lemari arsip tiga pintu dan 18 kursi kerja dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp37.074.000 dan terealisasi Rp34.521.000 atau 93,11%.

4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 unit finger print, 1 unit CCTV, 3 unit laptop, 8 unit printer, 1 unit scanner dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan dengan alokasi Rp110.635.000 dan terealisasi Rp109.115.500 atau 98,63%.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.584.664 dan terealisasi sebesar Rp 96.279.391 atau 90,33%.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa tenaga jasa perorangan yang terdiri dari penyediaan jasa sopir kepala badan dan penyediaan jasa tenaga lainnya (kebersihan dan penjaga malam) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 116.091.418 dan terealisasi sebesar Rp 113.647.655 atau 97,89%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 unit kendaraan dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.950.000 dan terealisasi sebesar Rp39.052.226 atau 90,92%
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 unit dan 21 unit untuk kendaraan dinas roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 201.584.664 atau 69,37%.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Subkegiatan ini berupa servis komputer, pendingin ruangan (AC), Laptop, printer dengan target 22 unit dan terealisasi sebanyak 14 unit dengan capaian kinerja 63,64%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.750.000 dan terealisasi sebesar Rp16.180.464 atau 60,49%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan karena belanja sesuai kebutuhan.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Subkegiatan ini berupa rehabilitasi gedung kantor Bappeda dengan target 1 paket rehap gedung kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%., dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.356.000 dan terealisasi Rp83.280.000, atau 99,91%.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator:

- a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.
- b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik
Subkegiatan ini berupa Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.293.000 dan terealisasi sebesar Rp31.067.194 atau 93,31%
 - 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Subkegiatan ini berupa forum antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota untuk mendapat masukan penyempurnaan penetapan RKPD 2026 dan juga pelaksanaan musrenbang RPMJD 2025-2029 Kota Payakumbuh dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.908.750 dan terealisasi sebesar Rp65.963.208 atau 95,73%.
 - 3) Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan
Subkegiatan ini berupa penyiapan bahan dan usulan untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target 235 usulan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.999.000 dan terealisasi sebesar Rp 20.218.698 atau 96,28%.
 - 4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2025 dan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dengan target 3 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp341.574.200 dan terealisasi sebesar Rp331.852.513 atau 97,15%.

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:

Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota

Subkegiatan ini berupa penyusunan buku profil daerah kota payakumbuh target kinerja 1 buku, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.429.500 dan terealisasi sebesar Rp11.336.278 atau 99,18%.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini berupa pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berupa koordinasi pelaksanaan DAK, dengan target sebesar 1 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.770.750 dan terealisasi sebesar Rp 15.741.869 atau 99,82%

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Subkegiatan ini berupa evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD 2026 dan perubahan RKPD 2025 dengan target 2 laporan dan terealisasi 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.039.000 dan terealisasi sebesar Rp80.894.481 atau 95,13%.

4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

Subkegiatan ini berupa forum kegiatan pengumpulan data pembangunan daerah yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

dengan target 3 dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yaitu pada dokumen RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp90.773.900 dan terealisasi sebesar Rp89.780.275 atau 98,91%.

c Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:

- a. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.
- b. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.
- c. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Subkegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen RKPD 2026 dengan Renja. Dengan target 16 dokumen Renja 2026 lingkup bidang sosial budaya, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.307.450, dan terealisasi sebesar Rp21.049.282 atau 98,79%
 - 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Subkegiatan ini berupa Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, yaitu dokumen RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025, RPJMD 2025-2029 terealisasi dengan

capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.208.191.800 dan terealisasi sebesar Rp 207.764.499 atau 99,79%.

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Subkegiatan ini berupa koordinasi yang optimal dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan, menyamakan persepsi dalam penyusunan instrumen penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian program - program penanggulangan kemiskinan dengan target 1 laporan LP2KD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.801.750- dan terealisasi sebesar Rp16.602.409 atau 98,81%

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu:

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Subkegiatan ini berupa asistensi kesesuaian penyusunan dokumen Renja dengan dokumen RKPD 2026 lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 laporan perangkat daerah dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.430.750, dan terealisasi sebesar Rp3.229.750, atau 3,35%. Pada kegiatan ini selain 7 laporan asistensi yang telah dilaksanakan juga terdapat penyusunan Dokumen RAD Pangan dan Gizi yang tidak dapat ditambahkan kedalam target subkegiatan karena ketika penyusunan subkegiatan output sudah terkunci oleh sistem. Dokumen RAD Pangan dan Gizi tidak terlaksana karena RAD Pangan dan gizi penyelesaiannya harus sama dengan RPJMD, informasi awal dari Bappenas bulan September dan Oktober 2025 harus selesai, pada pelaksanaannya sampai akhir desember 2025 juknisnya tidak ada. Sehingga realisasi anggaran hanya 3,35%

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RKPD dengan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 laporan yang dimonitoring dan dievaluasi dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.485.800 dan terealisasi sebesar Rp5.425.114, atau 98,89%.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan yaitu:

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Subkegiatan ini berupa asistensi penyusunan RKPD 2026 dengan Renja 2026 lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 8 laporan yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renja 2026 bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.514.050 dan terealisasi sebesar Rp69.095.165 atau 99,40%.

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur

Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 laporan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renja Bidang IPW dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp41.023.900 dan terealisasi sebesar Rp38.500.544 atau 93,85%

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Subkegiatan ini berupa sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dokumen RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 laporan hasil sinkronisasi Renja dengan RKPD pada bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp96.767.500 dan terealisasi sebesar Rp85.671.438 atau 88,53%.

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah indikator Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Target kinerja pada tahun 2026 adalah 75% dengan realisasi 75% dan capaian kinerja 100%.

Program Penelitian dan Pengembangan daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan yaitu:

- 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan didukung dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu:
Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial
Subkegiatan ini berupa penelitian bidang sosial dengan judul Fenomena peningkatan minat terhadap sekolah swasta dibanding sekolah negeri, dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700, dan terealisasi sebesar Rp 99.972.489 atau 99,97%.
- 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan didukung dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu:
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Subkegiatan ini berupa penelitian bidang ekonomi dan pembangunan, dengan judul Strategi Pengembangan Pusat Perkotaan Kota Payakumbuh (rekomendasi arsitektur). Target kegiatan ini berupa 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700 dan terealisasi sebesar Rp99.973.349 atau 99,97%.
- 3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu:
Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
Subkegiatan ini berupa kegiatan motivasi inovasi dan pendampingan untuk inovasi unggulan pada semua perangkat daerah dengan target 1 laporan hasil fasilitasi inovasi & teknologi tepat guna daerah dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.409.000, dan terealisasi sebesar Rp70.322.349 atau 99,88%.

2. Indeks Inovasi Daerah

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54,85	51,50	93,89

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 54,86 Kota Payakumbuh memperoleh nilai 51,50 atau sebesar 93,89%. Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian resmi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik digital maupun non-digital, yang telah dilaporkan. IID digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah, memotivasi peningkatan pelayanan publik, dan memberikan penghargaan (Innovative Government Award)

Gambar 3.2
INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2025



S A L I N A N

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6097 TAHUN 2025

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. Bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025;

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6097 TAHUN 2025
TENTANG
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

A. Kategori Provinsi

Rekapitulasi:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Sangat Inovatif | : 8 Provinsi |
| 2) Inovatif | : 23 Provinsi |
| 3) Kurang Inovatif | : 7 Provinsi |
| 4) Tidak Dapat Dinilai (<i>Disclaimer</i>) | : 0 Provinsi |

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Provinsi Jawa Timur	90,84	Sangat Inovatif
2.	Provinsi Sumatera Barat	86,96	Sangat Inovatif
3.	Provinsi Jawa Barat	85,05	Sangat Inovatif
4.	Provinsi DKI Jakarta	82,93	Sangat Inovatif
5.	Provinsi Jawa Tengah	82,63	Sangat Inovatif
6.	Provinsi Sumatera Selatan	81,23	Sangat Inovatif
7.	Provinsi Bali	77,04	Sangat Inovatif
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	73,25	Sangat Inovatif
9.	Provinsi Sumatera Utara	64,79	Inovatif
10.	Provinsi Maluku Utara	63,64	Inovatif
11.	Provinsi Banten	63,35	Inovatif
12.	Provinsi Sulawesi Selatan	62,35	Inovatif
13.	Provinsi Aceh	62,23	Inovatif
14.	Provinsi Kalimantan Timur	59,90	Inovatif
15.	Provinsi Jambi	59,75	Inovatif
16.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59,70	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
27.	Kota Parepare	66,84	Sangat Inovatif
28.	Kota Serang	66,82	Sangat Inovatif
29.	Kota Sawahlunto	66,08	Sangat Inovatif
30.	Kota Kediri	66,01	Sangat Inovatif
31.	Kota Bandung	65,07	Sangat Inovatif
32.	Kota Pariaman	63,50	Inovatif
33.	Kota Solok	63,17	Inovatif
34.	Kota Banjarmasin	62,95	Inovatif
35.	Kota Batam	61,91	Inovatif
36.	Kota Makassar	61,75	Inovatif
37.	Kota Blitar	61,34	Inovatif
38.	Kota Bontang	60,94	Inovatif
39.	Kota Balikpapan	60,92	Inovatif
40.	Kota Tangerang Selatan	60,76	Inovatif
41.	Kota Metro	60,71	Inovatif
42.	Kota Bogor	60,41	Inovatif
43.	Kota Pekanbaru	59,13	Inovatif
44.	Kota Dumai	59,03	Inovatif
45.	Kota Kotamobagu	58,62	Inovatif
46.	Kota Pontianak	58,47	Inovatif
47.	Kota Palu	58,32	Inovatif
48.	Kota Samarinda	58,27	Inovatif
49.	Kota Medan	58,16	Inovatif
50.	Kota Banjar	57,80	Inovatif
51.	Kota Malang	57,62	Inovatif
52.	Kota Sungai Penuh	57,42	Inovatif
53.	Kota Kendari	56,28	Inovatif
54.	Kota Banjarbaru	56,19	Inovatif
55.	Kota Singkawang	55,60	Inovatif
56.	Kota Pangkal Pinang	55,52	Inovatif
57.	Kota Bitung	54,73	Inovatif
58.	Kota Lubuk Linggau	54,66	Inovatif
59.	Kota Binjai	54,54	Inovatif
60.	Kota Pasuruan	54,53	Inovatif
61.	Kota Bukittinggi	53,58	Inovatif
62.	Kota Tasikmalaya	52,57	Inovatif
63.	Kota Palangkaraya	52,01	Inovatif
64.	Kota Payakumbuh	51,50	Inovatif
65.	Kota Depok	49,71	Inovatif
66.	Kota Gorontalo	49,42	Inovatif

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 adalah 51,50

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 3.11

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	9.583	41,47	54,62	54,85	51,50	93,89

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Indeks inovasi daerah yang di terbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri setiap tahunnya, Nilai inovasi tahun 2022 merupakan masa transisi inovasi pelayanan publik yang lebih umum dan efisiensi birokrasi sedangkan tahun 2023-2024 lebih berfokus pada inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (dampak langsung pada masyarakat). Tahun 2022 skor inovasi daerah 9.583, sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi peningkatan nilai indeks inovasi daerah dan di tahun 2025 terjadi penurunan 3,12point dari tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2029 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Dokumen Jangka Menengah

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Persentase Capaian Realisasi 2025 (%)	Persentase Terhadap Target Akhir Renstra 2029
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54,85	51,50	55,95	93,89	92,05

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah 93,89%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai 92,05%

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/beberapa daerah di Indonesia

Berikut adalah contoh data nilai indeks inovasi tahun 2025 dari beberapa daerah:

- a. Kota Parepare 66,84
- b. Kota Serang 66,82
- c. Kota Sawahlunto 66,08
- d. Kota Kediri 66,01

Nilai Indeks Inovasi Payakumbuh 51,50 masih dibawah nilai beberapa daerah di atas.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai target kualitas indeks kualitas perencanaan, Bappeda Kota Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah–langkah untuk meningkatkan capaian kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	54,85	51,50	93,89	Kurangnya minat perangkat daerah dalam mengusulkan inovasi	dilakukan penguatan komitmen daerah terkait dengan inovasi

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54,85	51,50	93,89%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7.270.643.094	6.338.336.459	87,18%
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	667.788.100	646.854.516	96,87%
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	555.523.000	447.338.036	80,53%
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	270.408.400	270.267.861	99,95%

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
						93,89%		8.764.362.594	7.702.796.872	87,89%
		Tingkat efisiensi				6,00%				
		Tingkat efektivitas				106,83%				

Dari Tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan, didukung oleh semua program bappeda. Capaian Kinerja dari indikator indeks inovasi daerah 93,89% sedangkan capaian keuangan dari program yang mendukungnya yaitu 87,89%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 6,00%, sedangkan tingkat efektivitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 106,83%.

G. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sama dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja

3.1.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut

Indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

A. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	85,00	83,00	97,65

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 85 Bappeda Kota Payakumbuh memperoleh nilai 83 atau sebesar 97,65%. Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat adalah skor hasil penilaian atas implementasi SAKIP yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi berorientasi hasil dan digunakan sebagai bahan perbaikan akuntabilitas.

Inspektorat menggunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian hasil, bertujuan agar instansi menjadi lebih akuntabel dan berorientasi kinerja.

Nilai akhir evaluasi AKIP dikategorikan menjadi beberapa predikat berdasarkan tingkat kinerjanya

- AA (Sangat Memuaskan): > 90 - 100
- A (Memuaskan): > 80 - 90
- BB (Sangat Baik): > 70 - 80
- B (Baik): > 60 - 70
- CC (Cukup): > 50 - 60
- C (Kurang): > 30 - 50
- D (Sangat Kurang): 0 - 30

Gambar 3.3
LHE SAKIP BAPPEDA TAHUN 2025

 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH INSPEKTORAT Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara Payakumbuh, Sumatera Barat 26213 Email : inspektoratpyk@gmail.com	
Nomor Tanggal	: 700/41.b/LHE/Insp-Pyk/2025 : 21 Juli 2025
LAPORAN HASIL EVALUASI	
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2025	

 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH INSPEKTORAT Jalan Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Email. inspektoratpyk@gmail.com	
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024	
Pada Satuan/Unit Kerja Tahun Evaluasi Tahun Anggaran Nomor Tanggal	: Pemerintah Kota Payakumbuh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh : 2024 : 2025 : 700/ /LHE/Insp-Pyk/2025 : 21 Juli 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan berbentuk nilai dalam rentang mulai dari 0 s.d. 100. Untuk tahun 2024, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh** memperoleh nilai sebesar **83,00 (delapan puluh tiga)** dengan predikat **MEMUASKAN (A)**, dengan interpretasi "Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4".

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2024 memperoleh nilai **83,00**, predikat **A (Memuaskan)**. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,60	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,70	13,95
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	19,25
Total		100	82,65	83,00
Interpretasi Kinerja			A	A

Hasil evaluasi tahun 2024 ini lebih tinggi dari hasil evaluasi tahun lalu (2023) dengan nilai 82,65. Penjelasan lebih lanjut atas Hasil Evaluasi Sistem

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP yang lebih baik kedepannya, diharapkan komitmen semua pihak untuk berkontribusi dan mendorong Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Bappeda Kota Payakumbuh, mulai dari penyusunan perencanaan yang berkualitas dan selaras, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam upaya pencapaian IKU Perangkat Daerah, dan pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian sasaran daerah.

Inspektorat Kota Payakumbuh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh jajaran Bappeda Kota Payakumbuh, yang telah memberikan data/dokumen yang diperlukan dan menyampaikan fakta saat interviu, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2024.

27

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2024.

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,

ANDRI NARWAN, S.Sos., M.M., CGCAE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730319 199305 1 001

Sumber : Inspektorat Kota Payakumbuh

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat tahun 2025 adalah 83,00

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.17

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	81,50	81,50	82,65	85,00	83,00	97,65

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Setiap tahun nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh inspektorat terjadi peningkatan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2029 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.18
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Dokumen Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Persentase Capaian Realisasi 2025 (%)	Persentase Terhadap Target Akhir Renstra 2029
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	85,00	83,00	87,00	97,65	95,40

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Dari table diatas dapat dilihat, bahwa capaian Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat 97,65%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai 95,40%.

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/beberapa instansi dan daerah di Indonesia

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024–2025, nilai yang diperoleh berbagai instansi menunjukkan tren peningkatan, dengan mayoritas berada di kategori "Sangat Baik" (BB) hingga "Memuaskan" (A). Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat/APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada masing-masing instansi berdasarkan komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Nilai evaluasi AKIP/SAKIP Tahun 2024–2025 dari berbagai sumber:

- Kementerian Hukum (Kemenkumham): Mencapai nilai 78,32 pada tahun 2025.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai target Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat, Bappeda Kota Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah–langkah untuk meningkatkan capaian kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.19
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	85,00	83,00	97,65	Koordinasi yang baik antar bidang	
						Komitmen ASN dalam menyelesaikan pekerjaan	

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.20
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	85,00	83,00	97,65%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7.270.643.094	6.338.336.459	87,18%
Tingkat efisiensi							10,47%			
Tingkat efektivitas							112,01%			

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Capaian Kinerja dari indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat sebesar 97,65% sedangkan capaian keuangan dari program yang mendukungnya yaitu 87,18%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 10,47%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 112,01%.

G. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, adalah sebagai berikut:

Tabel.3.21
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Nilai IKM	89	Nilai	88,53	Nilai	99,47%	7.270.643.094	6.338.336.459	87,18%
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah	Nilai IKM Bappeda	89	Nilai	88,53	Nilai	99,47%			
			Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	102.954.450	100.882.130	97,99%
			Persentase sasaran, progam dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	6	dokumen	100,00%	14.999.000	14.056.117	93,71%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6	Laporan	100,00%	87.955.450	86.826.013	98,72%
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95	Persentase	87,89	Persentase	92,52%	5.429.549.712	4.785.375.331	88,14%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	orang/bulan	37	orang/bulan	100,00%	5.121.728.912	4.504.586.331	87,95%
	2	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	307.820.800	280.789.000	91,22%
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	43.000.000	42.957.000	99,90%
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43	paket	43	paket	100,00%	43.000.000	42.957.000	99,90%
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	245.004.850	239.404.598	97,71%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	paket	8	paket	100,00%	4.804.000	4.771.890	99,33%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	paket	10	paket	100,00%	30.106.000	27.188.649	90,31%
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	3	paket	100,00%	18.978.000	17.049.155	89,84%
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	19.938.450	19.800.000	99,31%
	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	laporan	1	laporan	100,00%	4.404.500	3.974.670	90,24%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1	laporan	100,00%	154.774.000	154.695.853	99,95%
	7	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	11.999.900	11.924.381	99,37%
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80	Persentase	80	Persentase	100,00%	783.802.000	619.693.000	79,06%
	1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	1	unit	100,00%	599.334.000	446.000.000	74,42%
	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	1	unit	100,00%	36.759.000	30.056.500	81,77%
	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	unit	20	unit	100,00%	37.074.000	34.521.000	93,11%
	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	unit	14	unit	100,00%	110.635.000	109.115.500	98,63%
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	222.676.082	209.927.046	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	1	laporan	100,00%	106.584.664	96.279.391	90,33%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	1	laporan	100,00%	116.091.418	113.647.655	97,89%
	VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80	Persentase	80	Persentase	100,00%	443.656.000	340.097.354	76,66%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	100,00%	42.950.000	39.052.226	90,92%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	unit	25	unit	100,00%	290.600.000	201.584.664	69,37%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	unit	14	unit	63,64%	26.750.000	16.180.464	60,49%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100,00%	83.356.000	83.280.000	99,91%

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

- a. Nilai IKM. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 89,00 dengan realisasi 88,53 dan capaian kinerja 99,47%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan yaitu:

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 (enam) dokumen perencanaan dan pelayanan publik yaitu Renja perubahan 2025, Renja 2026, Survey Kepuasan Masyarakat 2 semester Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 dan SPIP dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp14.999.000 dan terealisasi sebesar Rp14.056.117 atau 93,71%.

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 laporan kinerja perangkat daerah yaitu laporan triwulan I, II, III, dan IV, LKPJ, dan LKJIP. dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp87.955.450 dan terealisasi sebesar Rp 86.826.013 atau 98,72%.

- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan ini berupa pembayaran gaji, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan target 37 orang ASN dan terealisasi sebanyak 37 orang ASN. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp5.121.728.912 dan terealisasi sebesar Rp4.504.586.331 atau 87,95 %.

2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Subkegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan pada Bappeda dengan target 1 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan terealisasi 1

dokumen dengan capaian 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp307.820.800 dan terealisasi sebesar Rp280.789.000 atau 91,22 %

- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas bagi ASN Bappeda dengan target 43 paket pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan dan terealisasi sebanyak 43 paket dengan capaian 100% dilaksanakan alokasi anggaran Rp43.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.42.957.000 atau 99,90%.

- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Subkegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Payakumbuh, dengan target sebanyak 8 paket dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.804.000 dan terealisasi sebesar Rp4.771.890 atau 99,33%.

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Subkegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor berupa air galon isi ulang, hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor dengan target 10 paket Bahan logistik kantor yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.106.000, dan terealisasi sebesar Rp27.188.649 atau 90,31%

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak (Amplop dinas, kop surat logo, memo, kop dinas, map kop dinas, lembar disposisi, kwitansi NCR, BKU NCR, SPP/SPM), penggandaan dan penjilidan dan cetak spanduk dengan target sebanyak 3 paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.978.000, dan terealisasi sebesar Rp17.049.155 atau 89,84%

- 4) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
Subkegiatan ini berupa penyediaan jenis surat kabar nasional yaitu Kompas dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.938.450 dan terealisasi sebesar Rp19.800.000 atau 99,31%
 - 5) **Fasilitasi Kunjungan Tamu**
Subkegiatan ini berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan fasilitasi kunjungan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.404.500 dan terealisasi sebesar Rp3.974.670 atau 90,24%
 - 6) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Subkegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 1 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.774.000 dan terealisasi sebesar Rp 154.695.853 atau 99,95%
 - 7) **Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**
Subkegiatan ini berupa pengelolaan website Bappeda, dengan target 1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.999.900 dan terealisasi sebesar Rp11.924.381 atau 99,37%.
- 5 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:**
- 1) **Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**
Subkegiatan ini berupa 1 unit kendaraan dinas jabatan dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp599.334.000 dan terealisasi Rp446.000.000 atau 74,42%

- 2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 unit kendaraan dinas roda 2 operasional dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp36.759.000 dan terealisasi Rp30.056.500 atau 81,77%
 - 3) Pengadaan Mebel
Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 buah lemari arsip dua pintu, 1 buah lemari arsip tiga pintu dan 18 kursi kerja dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp37.074.000 dan terealisasi Rp34.521.000 atau 93,11%.
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 unit finger print, 1 unit CCTV, 3 unit laptop, 8 unit printer, 1 unit scanner dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan dengan alokasi Rp110.635.000 dan terealisasi Rp109.115.500 atau 98,63%.
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.584.664 dan terealisasi sebesar Rp 96.279.391 atau 90,33%.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa tenaga jasa perorangan yang terdiri dari penyediaan jasa sopir kepala badan dan penyediaan jasa tenaga lainnya (kebersihan dan penjaga malam) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 116.091.418 dan terealisasi sebesar Rp 113.647.655 atau 97,89%.
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 unit kendaraan dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.950.000 dan terealisasi sebesar Rp39.052.226 atau 90,92%
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 unit dan 21 unit untuk kendaraan dinas roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 201.584.664 atau 69,37%.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Subkegiatan ini berupa servis komputer, pendingin ruangan (AC), Laptop, printer dengan target 22 unit dan terealisasi sebanyak 14 unit dengan capaian kinerja 63,64%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.750.000 dan terealisasi sebesar Rp16.180.464 atau 60,49%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan karena belanja sesuai kebutuhan.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Subkegiatan ini berupa rehabilitasi gedung kantor Bappeda dengan target 1 paket rehap gedung kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%., dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.356.000 dan terealisasi Rp83.280.000 atau 99,91%.

3.1.3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	90,00	80,31	89,23

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 90,00 Kota Payakumbuh memperoleh nilai 80,31 atau sebesar 89,23%. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Gambar 3. 4
Perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^n (Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^n Bobot_i}$ Keterangan : • Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) • Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan • Aspek penilaian meliputi, misalnya:
--------------------------	---

	➤ Kelengkapan dokumen ➤ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➤ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➤ Tingkat partisipasi masyarakat ➤ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➤ Ketepatan waktu penyusunan
--	--

Indikator	Bobot (%)	Defenisi Operasional	Formula Perhitungan	EVIDEN 2025	2025
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		Penilaian terhadap sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berkualitas, terpadu, konsisten, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	$IPPD = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{skor } i \times \text{bobot } i)}{\sum_{i=1}^n \text{bobot } i}$ Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IKPPD) adalah jumlah dari hasil perkalian skor setiap komponen perencanaan dengan bobot komponen tersebut, untuk semua komponen dari komponen pertama sampai komponen terakhir." IKPPD : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Skor i = Skor yang diperoleh untuk komponen ke-i Bobot i = Bobot yang ditetapkan untuk komponen ke-i n = Jumlah komponen kualitas perencanaan		
1 Kelengkapan dokumen	5	Dokumen perencanaan yang disusun (RKPD, Perubahan RKPD, Renja (semua opd), Perubahan Renja (semua opd))	Jumlah dokumen perencanaan yang selesai disusun/jumlah dokumen perencanaan yang seharusnya selesai disusun	1. RPJMD 2. RKPD 2026 3. PERUBAHAN RKPD 2025 4. RENSTRA 5. RENJA 2026 6. PERUBAHAN RENJA 2025	5
2 Keselarasan antar dokumen perencanaan	20	- RPJMD selaras dengan RPJPD - RKPD selaras dengan RPJMD - Renstra selaras dengan RPJMD - Renja selaras dengan RKPD	Keselarasan antar dokumen perencanaan		20
3 Keterpaduan dengan prioritas nasional	15	Prioritas Nasional (asta cita) harus didukung oleh program dan Kegiatan Daerah	Jumlah Prioritas Nasional yang didukung RKPD/ Total Jumlah Prioritas Nasional		15
4 Tingkat Partisipasi Masyarakat	15	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kota	jumlah unsur masyarakat yang diundang/total jumlah undangan untuk masyarakat		1,25
5 Penggunaan SIPD	15	Proses penyusunan dokumen perencanaan harus melalui SIPD (Musrenbang kelurahan (47 Kelurahan), musrenbang kecamatan (5 Kecamatan), pokir (25 Anggota DPRD), hibah bansos, Renja (31 OPD), RKPD, Perubahan Renja(31 OPD), RKPD Perubahan, Evaluasi dan Pelaporan Renja (31 OPD), Evaluasi dan Pelaporan RKPD, penggunaan e-wali data (29 Urusan))	Jumlah proses dan kelembagaan yang menggunakan SIPD/ Jumlah seluruh proses dan lembaga yang seharusnya menggunakan SIPD		15
6 Ketepatan waktu penyusunan dokumen	15	Dokumen disusun dan ditetapkan sesuai jadwal Permendagri (RKPD, Perubahan RKPD, Renja, Perubahan Renja)	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu/ jumlah dokumen perencanaan yang disusun	yang tidak sesuai RKPD dan RKPD PERUBAHAN	10
7 Persentase capaian target indikator kinerja utama	15	Target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dalam RPJMD	Jumlah IKU RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah IKU RPJMD		14,0625
	100				80,3125

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah 80,31

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.23

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	NA	NA	NA	90,00	80,31	89,23

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dalam penyusunan dokumen rencana strategi tahun 2025-2029 untuk unsur perencanaan memakai indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tidak ada perbandingan untuk tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.24
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir
Dokumen Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Persentase Capaian Realisasi 2025 (%)	Persentase Terhadap Target Akhir Renstra 2029
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	90,00	80,31	92,00	89,23	87,29

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 89,23%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai 87,29%.

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain di Indonesia

Sampai saat ini belum ada perbandingan indeks perencanaan pembangunan daerah dengan daerah lain.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah-langkah :

Tabel 3.25
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00	80,31	89,23	Dalam penyusunan dokumen RKPD dan Perubahan RKPD tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Pada penyusunan dokumen RKPD selanjutnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	90,00	80,31	89,23%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	667.788.100	646.854.516	96,87%
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	555.523.000	447.338.036	80,53%
							Total	1.223.311.100	1.094.192.552	89,45%
Tingkat efisiensi							-0,22%			
Tingkat efektivitas							99,75%			

Dari Tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah , didukung oleh dua program Bappeda. Capaian Kinerja dari indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 89,23% sedangkan capaian

keuangan dari program yang mendukungnya yaitu 89,45%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar -0,22%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 99,75%.

G. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel.3.27

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Kinerja					Keuangan		
			Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	667.788.100	646.854.516	96,87%
		Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	587.975.700	566.350.713	96,32%
	I Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	464.774.950	449.101.613	96,63%
		Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	19,5	Persentase	20,48	Persentase	105,03%			
	1 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	berita acara	2	berita acara	100,00%	33.293.000	31.067.194	93,31%
	2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	berita acara	2	berita acara	100,00%	68.908.750	65.963.208	95,73%
	3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	235	usulan	235	usulan	100,00%	20.999.000	20.218.698	96,28%
	4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	341.574.200	331.852.513	97,15%
	II Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	98,5	Persentase	98,5	Persentase	100,00%	11.429.500	11.336.278	99,18%
	1 Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	buku	1	buku	100,00%	11.429.500	11.336.278	99,18%
	III Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	97,5	Persentase	97,5	Persentase	100,00%	100.809.750	96.636.350	95,86%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	93,55	Persentase	93,55	Persentase	100,00%			
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	laporan	1	laporan	100,00%	15.770.750	15.741.869	99,82%
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	laporan	2	laporan	100,00%	85.039.000	80.894.481	95,13%
	IV	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	71,43	Persentase	71,43	Persentase	100,00%	90.773.900	89.780.275	98,91%
			Tingkat akseibilitas data	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	90.773.900	89.780.275	98,91%
B	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	555.523.000	447.338.036	80,53%
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	I	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	246.301.000	245.416.190	99,64%
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	dokumen	16	dokumen	100,00%	21.307.450	21.049.282	98,79%
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	208.191.800	207.764.499	99,79%
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	1	laporan	100,00%	16.801.750	16.602.409	98,81%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja					Keuangan		
				Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	II	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	101.916.550	8.654.699	8,49%
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7	laporan	7	laporan	100,00%	96.430.750	3.229.585	3,35%
	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7	laporan	7	laporan	100,00%	5.485.800	5.425.114	98,89%
	III	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%	207.305.450	193.267.147	93,23%
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persentase	100	Persentase	100,00%			
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	laporan	8	laporan	100,00%	69.514.050	69.095.165	99,40%
	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	laporan	8	laporan	100,00%	41.023.900	38.500.544	93,85%
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	laporan	8	laporan	100,00%	96.767.500	85.671.438	88,53%

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator:

- a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.
- b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik

Subkegiatan ini berupa Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.293.000 dan terealisasi sebesar Rp31.067.194 atau 93,31%

- 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini berupa forum antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota untuk mendapat masukan penyempurnaan penetapan RKPD 2026 dan juga pelaksanaan musrenbang RPMJD 2025-2029 Kota Payakumbuh dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.908.750 dan terealisasi sebesar Rp65.963.208 atau 95,73%.

- 3) Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan

Subkegiatan ini berupa penyiapan bahan dan usulan untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target 235 usulan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 20.999.000 dan terealisasi sebesar Rp 20.218.698 atau 96,28%.

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dengan target 3 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp341.574.200 dan terealisasi sebesar Rp331.852.513 atau 97,15%.

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:

Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota

Subkegiatan ini berupa penyusunan buku profil daerah kota payakumbuh target kinerja 1 buku, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.429.500 dan terealisasi sebesar Rp11.336.278 atau 99,18%.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu:

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini berupa pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berupa koordinasi pelaksanaan DAK, dengan target sebesar 1 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.770.750 dan terealisasi sebesar Rp 15.741.869 atau 99,82%

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Subkegiatan ini berupa evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD 2026 dan perubahan RKPD 2025 dengan target 2 laporan dan terealisasi 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.039.000 dan terealisasi sebesar Rp80.894.481 atau 95,13%.

4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

Subkegiatan ini berupa forum kegiatan pengumpulan data pembangunan daerah yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan target 3 dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yaitu pada dokumen RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp90.773.900 dan terealisasi sebesar Rp89.780.275,- atau 98,91%.

b Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:

- a. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.
- b. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.
- c. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Subkegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen RKPD 2026 dengan Renja. Dengan target 16 dokumen Renja 2026 lingkup bidang sosial budaya, terealisasi dengan capaian kinerja 100%.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.307.450, dan terealisasi sebesar Rp21.049.282 atau 98,79%

2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Subkegiatan ini berupa Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, yaitu dokumen RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025, RPJMD 2025-2029 terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.208.191.800 dan terealisasi sebesar Rp 207.764.499 atau 99,79%.

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Subkegiatan ini berupa koordinasi yang optimal dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan, menyamakan persepsi dalam penyusunan instrumen penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian program - program penanggulangan kemiskinan dengan target 1 laporan LP2KD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.801.750- dan terealisasi sebesar Rp16.602.409 atau 98,81%

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu:

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Subkegiatan ini berupa asistensi kesesuaian penyusunan dokumen Renja dengan dokumen RKPD 2026 lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 laporan perangkat daerah dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.430.750, dan terealisasi sebesar Rp3.229.750, atau 3,35%. Pada kegiatan ini selain 7 laporan asistensi yang telah dilaksanakan juga terdapat penyusunan Dokumen RAD Pangan dan Gizi yang tidak dapat ditambahkan kedalam target subkegiatan karena ketika penyusunan subkegiatan output sudah terkunci oleh system. Dokumen RAD Pangan dan Gizi tidak terlaksana karena

RAD Pangan dan gizi penyelesaiannya harus sama dengan RPJMD, informasi awal dari Bappenas bulan September dan Oktober 2025 harus selesai, pada pelaksanaannya sampai akhir desember 2025 juknisnya tidak ada. Sehingga realisasi anggaran hanya 3,35%

- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RKPD dengan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 laporan yang dimonitoring dan dievaluasi dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.485.800 dan terealisasi sebesar Rp5.425.114, atau 98,89%.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan yaitu:

- 1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Subkegiatan ini berupa asistensi penyusunan RKPD 2026 dengan Renja 2026 lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 8 laporan yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renja 2026 bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.514.050 dan terealisasi sebesar Rp69.095.165 atau 99,40%.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur
Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 laporan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renja Bidang IPW dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp41.023.900 dan terealisasi sebesar Rp38.500.544 atau 93,85%

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Subkegiatan ini berupa sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dokumen RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 laporan hasil sinkronisasi Renja dengan RKPD pada bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp96.767.500 dan terealisasi sebesar Rp85.671.438 atau 88,53%.

3.1.4 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	86,00	100,00	116,28

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 86,00 Kota Payakumbuh memperoleh nilai 100 atau sebesar 116,28%. Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Gambar 3.5

Rumus Perhitungan Kebijakan Berbasis Bukti

Rumus Berdasarkan metadata indikator RPJMD sesuai	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$ Keterangan :
--	---

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025	• Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. • Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
--	---

Tabel 3.29
PERATURAN DAERAH PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO	TENTANG	MULAI BERLAKU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	LEMBARAN DAERAH	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH	OPD	DASAR PERWAKO
1	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024	13 Agustus 2025	13 Agustus 2025	13 Agustus 2025	1 TAHUN 2025	70	BKD	PP No 12 Tahun 2019 tentang PKD dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis PKD
2	RPJMD TAHUN 2025-2029	19 Agustus 2025	19 Agustus 2025	19 Agustus 2025	2 TAHUN 2025	71	BAPPEDA	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3	PERUBAHAN APBD TA 2025	03 Oktober 2025	03 Oktober 2025	03 Oktober 2025	3 TAHUN 2025	72	BKD	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025
4	APBD TA 2026	30 Desember 2025	30 Desember 2025	30 Desember 2025	4 TAHUN 2025	73	BKD	Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2025

Tabel 3.30
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO	TENTANG	MULAI BERLAKU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	OPD	DASAR PERWAKO
1	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH	12-Mar-25	12-Mar-25	12-Mar-25	ORGANISASI	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
2	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2025	18-Mar-25	18-Mar-25	18-Mar-25	BKD	Peraturan Wali Kota Nomor 02 Tahun 2025
3	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN	27-Mar-25	27-Mar-25	27-Mar-25	BKD	Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2025
4	KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA ALAM MINANGKABAU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN	27-Mar-25	27-Mar-25	27-Mar-25	DINAS PENDIDIKAN	- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

NO	TENTANG	MULAI BERLAKU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	OPD	DASAR PERWAKO
						Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 26);
5	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	23-Apr-25	23-Apr-25	23-Apr-25	BKD	Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2025
4	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	2-Jun-25	2-Jun-25	BKD	BKD	Undang-undang no 1 tahun 2022 ttg HKPD Peraturan pemerintah 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah
7	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	7-Jul-25	7-Jul-25	7-Jul-25	BAPPEDA	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
8	PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	17-Jul-25	17-Jul-25	17-Jul-25	PEREKONOMIAN	Permendagri no 79 tahun 2018 ttg BLUD
9	RKPD TAHUN 2026	4-Aug-25	4-Aug-25	4-Aug-25	BAPPEDA	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
10	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	13-Aug-25	13-Aug-25	13-Aug-25	BKD	PP No 12 Tahun 2019 tentang PKD dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis PKD
11	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	4-Sep-25	4-Sep-25	4-Sep-25	BAPPEDA	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
12	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	19-Sep-25	19-Sep-25	19-Sep-25	BAPPEDA	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
13	PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2025	3-Oct-25	3-Oct-25	3-Oct-25	BKD	Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025
14	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD TA 2026	17-Dec-25	17-Dec-25	17-Dec-25	BKD	Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025
15	POLA TATA KELOLA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN	17-Dec-25	17-Dec-25	17-Dec-25	BKD	Permendagri no 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah
16	PENJABARAN APBD TA 2026	30-Dec-25	30-Dec-25	30-Dec-25	BKD	Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2025
17	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN	30-Dec-25	30-Dec-25	30-Dec-25	ORGANISASI	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Adalah 100%.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.31

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	NA	NA	NA	86,00	100,00	116,28

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dalam penyusunan dokumen rencana strategi tahun 2025-2029 untuk unsur penelitian dan pengembangan memakai indikator persentase kebijakan berbasis bukti, sehingga tidak ada perbandingan untuk tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2029 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.32
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Dokumen Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Persentase Capaian Realisasi 2025 (%)	Persentase Terhadap Target Akhir Renstra 2029
1	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	86,00	100,00	92,00	116,28	108,70

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa capaian Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 116,28%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tercapai 108,70%.

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain di Indonesia

Belum ada perbandingan persentase kebijakan berbasis bukti dengan standar nasional atau daerah lain di Indonesia

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai target persentase kebikan berbasis bukti, Bappeda Kota Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah – langkah

Tabel 3.32
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	86,00	100,00	116,28	Penetapan peraturan daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 dan Peraturan Walikota Payakumbuh tahun	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						2025, yang dilengkapi dengan analisis kebijakan	

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	86,00	100,00	116,28%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	270.408.400	270.267.861	99,95%
Tingkat efisiensi							16,33%			
Tingkat efektivitas							116,34%			

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran: Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah, didukung oleh satu program Bappeda. Capaian kinerja dari indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 116,28% sedangkan capaian keuangan dari program yang mendukungnya yaitu 99,95%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 16,33%, sedangkan tingkat efektivitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 116,34%.

H. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa Program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti adalah sebagai berikut:

Tabel.3.34

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja			Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	75 Persentase	75 Persentase	100,00%	270.408.400	270.267.861	99,95%
	I	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	99.999.700	99.972.489	99,97%
	1	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek - aspek sosial	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	99.999.700	99.972.489	99,97%
	II	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	99.999.700	99.973.023	99,97%
	1	Penelitian dan Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	99.999.700	99.973.023	99,97%
	III	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persentase	100 Persentase	100,00%	70.409.000	70.322.349	99,88%
	1	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan	1 laporan	100,00%	70.409.000	70.322.349	99,88%

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah indikator: Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Target kinerja pada tahun 2026 adalah 75% dengan realisasi 75% dan capaian kinerja 100%.

Program Penelitian dan Pengembangan daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan yaitu:

- 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan didukung dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu:
Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial
Subkegiatan ini berupa penelitian bidang sosial dengan judul Fenomena peningkatan minat terhadap sekolah swasta dibanding sekolah negeri, dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700, dan terealisasi sebesar Rp 99.972.489 atau 99,97%.
- 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan didukung dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu:
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Subkegiatan ini berupa penelitian bidang ekonomi dan pembangunan, dengan judul Strategi Pengembangan Pusat Perkotaan Kota Payakumbuh (rekomendasi arsitektur). Target kegiatan ini berupa 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700 dan terealisasi sebesar Rp99.973.349 atau 99,97%.
- 3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu:
Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
Subkegiatan ini berupa kegiatan motivasi inovasi dan pendampingan untuk inovasi unggulan pada semua perangkat daerah dengan target 1 laporan hasil fasilitasi inovasi & teknologi tepat guna daerah dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.409.000, dan terealisasi sebesar Rp70.322.349 atau 99,88%.

3.2 Realisasi Anggaran

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Keuangan		Capaian
			Target	Realisasi	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7.270.643.094	6.338.336.459	87,18%
	I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.954.450	100.882.130	97,99%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.000	14.056.117	93,71%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.955.450	86.826.013	98,72%
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.429.549.712	4.785.375.331	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.121.728.912	4.504.586.331	87,95%
	2	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	307.820.800	280.789.000	91,22%
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.000.000	42.957.000	
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	43.000.000	42.957.000	99,90%
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.004.850	239.404.598	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.804.000	4.771.890	99,33%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.106.000	27.188.649	90,31%
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.978.000	17.049.155	89,84%
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.938.450	19.800.000	99,31%
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.404.500	3.974.670	90,24%
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.774.000	154.695.853	99,95%
	7	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.999.900	11.924.381	99,37%
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783.802.000	619.693.000	
	1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	599.334.000	446.000.000	74,42%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Keuangan		Capaian
			Target	Realisasi	
	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	36.759.000	30.056.500	81,77%
	3	Pengadaan Mebel	37.074.000	34.521.000	93,11%
	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.635.000	109.115.500	98,63%
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.676.082	209.927.046	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.584.664	96.279.391	90,33%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.091.418	113.647.655	97,89%
	VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.656.000	340.097.354	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000	39.052.226	90,92%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.600.000	201.584.664	69,37%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.750.000	16.180.464	60,49%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.356.000	83.280.000	99,91%
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		667.788.100	646.854.516	
	VIII	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	464.774.950	449.101.613	
	1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	33.293.000	31.067.194	93,31%
	2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	68.908.750	65.963.208	95,73%
	3	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.999.000	20.218.698	96,28%
	4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	341.574.200	331.852.513	97,15%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Keuangan		Capaian
			Target	Realisasi	
	IX	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	11.429.500	11.336.278	
	1	Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	11.429.500	11.336.278	99,18%
	X	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.809.750	96.636.350	
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	15.770.750	15.741.869	99,82%
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85.039.000	80.894.481	95,13%
	XI	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	90.773.900	89.780.275	
	1	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	90.773.900	89.780.275	98,91%
C	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		555.523.000	447.338.036	
	XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	246.301.000	245.416.190	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.307.450	21.049.282	98,79%
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.191.800	207.764.499	99,79%
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.801.750	16.602.409	98,81%

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Keuangan		Capaian
			Target	Realisasi	
	XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	101.916.550	8.654.699	
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	96.430.750	3.229.585	3,35%
	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5.485.800	5.425.114	98,89%
	XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	207.305.450	193.267.147	
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	69.514.050	69.095.165	99,40%
	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	41.023.900	38.500.544	93,85%
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.767.500	85.671.438	88,53%
D	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		270.408.400	270.267.861	
	XV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	99.999.700	99.972.489	
	1	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek - aspek sosial	99.999.700	99.972.489	99,97%
	XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	99.999.700	99.973.023	
	1	Penelitian dan Pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah	99.999.700	99.973.023	99,97%
	XVII	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	70.409.000	70.322.349	
	1	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	70.409.000	70.322.349	99,88%
JUMLAH			8.764.362.594	7.702.796.872	87,89%

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Penggunaan anggaran untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.764.362.594 direalisasikan sebesar Rp.7.702.796.872, dengan tingkat realisasi sebesar 87,89%. Seluruh pengeluaran telah diarahkan untuk mendukung pencapaian output dan sasaran program, sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip efisiensi.

Pada Tahun 2025 terdapat tiga sub kegiatan yang realisasi keuangan di bawah 70 % yaitu subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya hal ini disebabkan belanja sesuai dengan kebutuhan, sedangkan subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian disebabkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi penyelesaiannya harus sama dengan RPJMD, informasi awal dari Bappenas Bulan September dan Oktober 2025 harus selesai, pada pelaksanaannya sampai akhir Desember 2025 petunjuk teknisnya tidak ada.

3.3 Capaian Prestasi Dan Penghargaan

Kota Payakumbuh menjadi Juara 1 Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 2025: pada peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Sumbar, Payakumbuh meraih Juara 1 Kategori Inovasi TTG

Gambar 3.5
Penghargaan yang Diraih
Juara 1 Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 2025



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025, merupakan laporan atas capaian kinerja tahun 2025. Secara garis besar dapat dilihat bahwa capaian dari lima target indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai dengan baik dengan kategori penilaian sangat tinggi dan tinggi, dengan rata-rata persentase mencapai 98,73%. Dari anggaran Rp8.764.362.594 terealisasi sebesar Rp7.702.796.872 atau sebesar 87,89%.

Dalam pencapaian target sasaran dijumpai beberapa kendala namun telah dilakukan strategi pemecahan masalah supaya sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Dan dimasa yang akan datang perlu dioptimalkan lagi .

Kami menyadari bahwa masih banyak perbaikan agar laporan kinerja instansi pemerintah Bappeda Kota Payakumbuh semakin optimal. Oleh karena itu, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, inovasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja instansi pemerintah, serta menjadi dasar untuk perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Payakumbuh, 26 Januari 2026

KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAFWAL,MM

NIP. 19680307 199009 1 001

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,00
	Indeks Inovasi Daerah	54,85
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	85,00
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00
4. Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	86,00

Payakumbuh, 6 Oktober 2025
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH**



Drs. SYAFWAL, MM
 NIP. 198901161990091001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.SYAFWAL,M.M**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr.dr.ZULMAETA,Sp.OG, KFM**

Jabatan : **Wali Kota Payakumbuh**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dr.dr.ZULMAETA,Sp.OG, KFM

Payakumbuh, 22 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

Drs.SYAFWAL,M.M
NIP. 196901161990091001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,01
		Indeks Inovasi Daerah	55,15
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	85,50
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,50
4	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	87,00

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

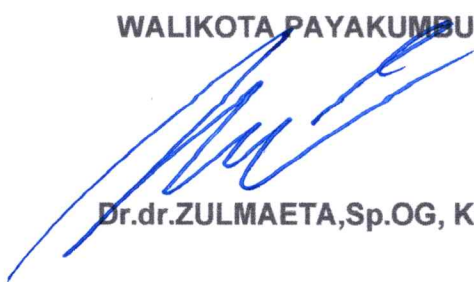
A. Program :

Nama Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 6.512.811.587,00	
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 382.679.325,00	
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 515.547.275,00	
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 145.175.850,00	
5. Program Riset dan Inovasi	Rp. 69.098.700	

B. Inovasi :

1. Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat (BIGDATA)

WALIKOTA PAYAKUMBUH



Dr.dr.ZULMAETA,Sp.OG, KFM

Payakumbuh, 22 Januari 2026
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Drs.SYAFWAL,M.M
NIP. 196901161990091001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI FADLI, SE, M. SE**

Jabatan : **Plt Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **Drs.SYAFWAL,MM**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs.SYAFWAL,MM
NIP. 196901161990091001

DENI FADLI, SE, M. SE
NIP. 198007152006041007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	91,7
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.841.093.382	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 102.954.450	
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 43.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 245.004.850	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 783.802.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 222.676.082	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 443.656.000	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 68.908.750	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 68.908.750	

Payakumbuh, Januari 2026

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 196901161990091001

**Plt SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



DENI FADLI, SE, M. SE
NIP. 198007152006041007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVA SOSIALITA, S. Akun**

Jabatan : **Kasubbag Keuangan**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **DENI FADLI, SE, M.SE**

Jabatan : **Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DENI FADLI, SE, M.SE
NIP. 198007152006041007

NOVA SOSIALITA, S. Akun
NIP. 198111222005012010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya capaian kinerja keuangan bappeda	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan Bappeda	100%
		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	93%
2	Meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset	Persentase LHP yang diselesaikan	100%

Plt. SEKRETARIS



DENI FADLI, SE, M.SE
NIP. 198007152006041007

Payakumbuh, 2 Januari 2026
KASUBBAG KEUANGAN



NOVA SOSIALITA, S.Akun
NIP. 19811122 200501 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YENI WIRDA,SE**
Jabatan : **Kasubbag Umum Dan Kepegawaian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **DENI FADLI, SE, M.SE**
Jabatan : **Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

DENI FADLI, SE, M.SE
NIP. 19800715 200604 1 007

Payakumbuh, 2 Januari 2026
PIHAK PERTAMA

YENIWIRDA,SE
NIP. 19730303 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kota, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Payakumbuh.	1 kali
2	Meningkatnya koordinasi internal yang terstruktur dan efektif untuk mencapai tujuan.	Jumlah pelaksanaan rapat internal Bappeda	9 kali
3	Capaian Realisasi keuangan	Persentase Capaian Realisasi keuangan Sekretariat	85-90 persen
4	Meningkatnya kualitas SDM Bappeda	1. Jumlah ASN Bappeda yang mengurus KGB	19
		2. Persentase ASN Bappeda yang mengurus Kenaikan pangkat	100 persen
5	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Umum Bappeda	1. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 persen
		2. Persentase Layanan umum Bappeda sesuai standar	100 persen
Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Ket
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.324.193.605	
2.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	396.599.800	
3.	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pd SKPD	10.454.450	
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,389.000	
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.730.000	
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.985.900	
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.430.600	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.100.000	
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.495.500	
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.043.000	
11.	Penataan arsip dinamis pd SKPD	1.322.500	
12.	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	1.322.500	
13.	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik	1.322.500	
14.	Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota	53.566.225	
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.247.200	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.653.732	
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.700.000	
19.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	9.378,900	
20.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.	11.648.000	
21.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.604.400	

Payakumbuh, 2 Januari 2026

**Pt. SEKRETARIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH**

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

DENI FADLI, SE, M.SE
NIP. 19800715 200604 1 007

YENIWIRDA, SE
NIP. 19730303 199703 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Sosial Budaya**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SYAFWAL, M.M**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. SYAFWAL, M.M
NIP. 196901161990091001

Payakumbuh, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA

FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP. 198303312006042009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA

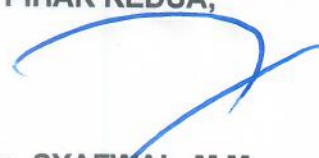
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
3	Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian dan ditindaklanjuti Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti pada Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	100%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran sebagai berikut :

A. Program :

Nama Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 239.565.425,00	

PIHAK KEDUA,


Drs. SYAFWAL, M.M
NIP. 196901161990091001

Payakumbuh, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA


FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP. 198303312006042009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DASWIRMAN, SE., M.M**

Jabatan : **Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sosial Budaya**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITTRIA NAZMI, S.Sos., M.M**

Jabatan : **Kepala Bidang Sosial Budaya**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP. 198303312006042009

Payakumbuh, 7 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

DASWIRMAN, SE., M.M
NIP. 197709092011011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG SOSIAL BUDAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya bahan analisis teknokratik untuk penyusunan RKPD	Jumlah dokumen naskah analisis teknokratik yang disusun	4 Laporan
2	Terlaksananya asistensi dan verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renja PD yang dikawal proses perencanaannya	2 PD
		Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) PD yang di asistensi dan verifikasi sesuai standar teknis	8 Laporan
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja indikator	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang di analisis	8 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 Laporan

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Sub Kegiatan :

Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 58.751.350	

PIHAK KEDUA,



FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP. 198303312006042009

Payakumbuh, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA



DASWIRMAN, SE., M.M
NIP. 197709092011011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MESI ANDRI DIANA, SE, MSi**
Jabatan : **Fungsional Perencana Ahli Muda**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Sosial Budaya**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP. 198303312006042009

PIHAK PERTAMA

MESI ANDRI DIANA, SE, MSi
NIP. 19810108 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya bahan analisis teknokratik untuk penyusunan RKPD	Jumlah dokumen naskah analisis teknokratik yang disusun.	6 Dokumen
2	Terlaksananya asistensi dan verifikasi verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) PD yang di asistensi dan verifikasi sesuai standar teknis	8 Laporan
		Jumlah Renja Perangkat Daerah yang dikawal proses Perencanaannya	2 PD
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja indikator	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang di analisis	12 Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	12 Laporan

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan sub kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

A. Sub Kegiatan :

Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 147.274.550	

Payakumbuh, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA,



FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP. 198303312006042009

PIHAK PERTAMA



MESI ANDRI DIANA, SE, MSI
NIP. 19810108 201001 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RENI DEWITA, SH**
Jabatan : **Fungsional Perencana Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Sosial Budaya**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP.198303312006042009

Payakumbuh, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA

RENI DEWITA, SH
NIP.197402232006042002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG SOSIAL BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya bahan analisis teknokratik untuk penyusunan RKPD	Jumlah dokumen naskah analisis teknokratik yang disusun.	3 dokumen
2.	Terlaksananya asistensi dan verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah renja Perangkat Daerah yang dikawal proses perencanaannya	2 perangkat daerah
		Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang di-asistensi dan verifikasi sesuai standar teknis	8 dokumen
3.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja indikator	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang di analisis	12 laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 laporan

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan anggaran Sub Kegiatan:

A. Sub Kegiatan

Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 33.539.525.-	

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA



FITTRIA NAZMI, S.Sos, M.M
NIP.198303312006042009

Payakumbuh, 7 Januari 2026
FUNGSIONAL PERENCANA
AHLI MUDA



RENI DEWITA, SH
NIP.197402232006042002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DENI FADLI, SE, M.SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Ekonomi Dan Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. SYAFWAL, M. Si**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini yang nanti diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. SYAFWAL, M. Si
NIP. 196901161990091001

Payakumbuh, 2 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

DENI FADLI, SE, M. SE
NIP. 198007152006041007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PERENCANAAN MAKRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Ekonomi dan Renmakro	1 0 0 %
2	Terkelolanya anggaran program dan kegiatan secara optimal	Persentase serapan anggaran Bidang Ekonomi dan Renmakro	8 5 - 9 0 %
3	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	2 d o k u m e n
		Persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	1 8 %
4	Meningkatnya hasil koordinasi Perencanaan dan Monev yang ditindaklanjuti bidang ekonomi dan renmakro	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Ekonomi dan Renmakro	1 0 0 %
		Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Ekonomi dan Renmakro	9 0 %
		Jumlah Berita Acara hasil verifikasi dan asistensi Renja perangkat daerah yang disepakati dengan perangkat daerah	1 4 d o k u m e n

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	313.447.150,-	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	180.699.075,-	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	95.122.500,-	
2. Program Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pembangunan Daerah	15.985.250,-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	15.985.250,-	

Payakumbuh, 2 Januari 2026

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Drs. SYAFWAL, M. Si
NIP. 196901161990091001

**KEPALA BIDANG EKONOMI DAN
PERENCANAAN MAKRO**

DENI FADLI, SE, M.SE
NIP. 19800715 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUNAIDI, S.Kom, M.Si**
Jabatan : **Fungsional Perencana Ahli Muda**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **DENI FADLI, SE, M.S.E**
Jabatan : **Kepala Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro**
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini yang nanti diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

DENI FADLI, SE, M.S.E
NIP. 19800715 200604 1 007

PIHAK PERTAMA

JUNAIDI, S.Kom, M.Si
NIP. 19840624 201001 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pendampingan penyusunan dokumen perencanaan PD lingkup bidang ekonomi dan Renmakro	Jumlah PD yang didampingi/dikawal penyusunan dokumen perencanaannya	1 Perangkat Daerah
2	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan KAK	Persentase serapan anggran yg dikelola	95,00%
3	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang difasilitasi proses disusun	2 dokumen
4	Terlaksananya pendampingan musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang yang didampingi	2 laporan
5	Terlaksananya koordinasi penyusunan perencanaan dan Monev yang ditindaklanjuti pada bidang Ekonomi dan Renmakro	Persentase keselarasan program RKPD dengan Renja PD terkait	100,00%
		Jumlah laporan monev Perangkat daerah yang dianalisis	4 laporan
		Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) PD yang di asistensi dan diverifikasi sesuai NSPK	3 dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	180.699.075,-	

KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PERENCANAAN MAKRO


DENI FADLI, SE, M.S.E
 NIP. 19800715 200604 1 007

Payakumbuh, 2 Januari 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA


JUNAIDI, S.Kom, M.Si
 NIP. 19840624 201001 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VIVI PRATIWI, S.Kom, M.Kom**

Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. SYAFWAL, MM**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini yang nanti diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. SYAFWAL, MM
NIP.19680116 199009 1 001

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

VIVI PRATIWI, S.Kom, M.Kom
NIP.19861006 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AKPD) AHLI MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya penyusunan analisis perencanaan keuangan daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan keuangan daerah yang tersusun	2 laporan
2	Terlaksananya bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran	3 Laporan
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	4 Laporan
4	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pembangunan daerah melalui penggunaan sistem informasi	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	100 persen
5	Terkelolanya anggaran sub kegiatan secara optimal sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Persentase serapan anggaran	85-90 persen

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah/ Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	 Rp.71.069.550,- Rp.24.052.950,-

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**


Drs. SYAFWAL, MM
NIP.19680116 199009 1 001

Payakumbuh, Januari 2026
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH (AKPD) AHLI MUDA**


VIVI PRATWI, S.Kom, M.Kom
NIP.19861006 201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAISAL,ST**

Jabatan : **Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. SYAFWAL, MM**

Jabatan : **Kepala Bappeda Kota Payakumbuh**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

FAISAL,ST
NIP. 19751014 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan lingkup bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur	100%
2	Meningkatnya pemanfaatan data Geospasial dalam mendukung pembangunana daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data dan informasi Geospasial	25 %
3	Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian dan ditindaklanjuti bidang Infrastruktur	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Infrastruktur	100 %
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	12 Kali
4	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional/provinsi	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infarastruktur	100 %
		Jumlah Berita Acara hasil verifikasi dan asisten Renja Perangkat Daerah yang disepakati	32 Laporan
5	Terkelolanya anggaran program dan kegiatan secara optimal	Persentase serapan anggaran	85 - 90 %

	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	259.996.600,-	
1.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	259.996.600,-	

Payakumbuh, Januari 2026

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**



FAISAL, ST
NIP. 19751014 201001 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDI VERDINAL, ST**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** .

Nama : **FAISAL,ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

FAISAL,ST

NIP. 19751014 201001 1 011

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

DIDI VERDINAL, ST

NIP. 19790919 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya bahan analisis teknokratik untuk penyusunan RKPD	Jumlah dokumen naskah analisis teknokratik yang disusun.	2 Dokumen
2.	Terlaksananya pembinaan pengelolaan data dan informasi geospasial	Jumlah laporan pembinaan pengelolaan data dan informasi geospasial yang dilaksanakan	5 Laporan
3.	Terlaksananya asistensi dan verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang di asistensi dan verifikasi sesuai NSPK	4 Dokumen
		Jumlah Perangkat Daerah yang dikawal proses perencanaannya	1 PD
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja indikator	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang di analisis	4 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 Laporan
5.	Terlaksananya sub kegiatan sesuai dengan KAK	Persentase serapan anggaran	85-90 %

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	162.001.200,-	

**KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**



FAISAL,ST
NIP. 19751014 201001 1 011

Payakumbuh, Januari 2026
**FUNGSIONAL PERENCANA
AHLI MUDA**



DIDI VERDINAL, ST
NIP. 19790919 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRI MURDI, ST,MM**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** .

Nama : **FAISAL,ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

FAISAL,ST

NIP. 19751014 201001 1 011

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

HENDRI MURDI, ST,MM

NIP. 19800612 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya bahan analisis teknokratik untuk penyusunan RKPD	Jumlah dokumen naskah analisis teknokratik yang disusun.	4 Dokumen
2.	Terlaksananya asistensi dan verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang di asistensi dan verifikasi sesuai NSPK	8 Dokumen
		Jumlah Perangkat Daerah yang dikawal proses perencanaannya	2 PD
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja indikator	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang di analisis	8 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 Laporan
4	Terlaksananya sub kegiatan sesuai dengan RAK	Persentase serapan anggaran	85-90 %

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	30.348.100,-	
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.461.100,-	

**KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**



FAISAL, ST
NIP. 19751014 201001 1 011

Payakumbuh, Januari 2026
**FUNGSIONAL PERENCANA
AHLI MUDA**



HENDRI MURDI, ST, MM
NIP. 19800612 201001 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yan bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVI RESTUTI, ST, MT**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** .

Nama : **FAISAL,ST**
Jabatan : **Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

FAISAL,ST

NIP. 19751014 201001 1 011

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

NOVI RESTUTI, ST, MT

NIP. 19781116 200501 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya bahan analisis teknokratik untuk penyusunan RKPD	Jumlah dokumen naskah analisis teknokratik yang disusun	4 Dokumen
2.	Terlaksananya asistensi dan verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (renja) PD yang di asistensi dan verifikasi sesuai NSPK	8 Dokumen
		Jumlah Renja PD yang dikawal proses perencanaannya	2 PD
3.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja indikator	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dianalisis	8 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 Laporan
4	Terlaksananya sub kegiatan sesuai dengan KAK	Persentase serapan anggaran	85-90 Persen

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	61.186.200,-	

Payakumbuh, Januari 2026

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

**FUNGSIONAL PERENCANA AHLI
MUDA**



FAISAL,ST

NIP. 19751014 201001 1 011



NOVI RESTUTI, ST, MT

NIP. 19781116 200501 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAFIZA, S.Si, ME**
Jabatan : **Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SYAFWAL, MM**
Jabatan : **Kepala Bappeda Kota Payakumbuh**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

PIHAK PERTAMA

HAFIZA, S.Si, ME
NIP. 19860310 200901 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pencapaian target Indikator Kinerja Daerah	90,00%
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi lingkup evaluasi dan pengendalian	8 kali
2	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan terkait kegiatan inovasi dan teknologi daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	95%
3	Meningkatnya fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti	Persentase Fasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait inovasi dan teknologi daerah	95%
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi lingkup urusan penelitian dan pengembangan	6 kali
4	Terkelolanya anggaran program dan kegiatan secara optimal	Persentase serapan anggaran	90%
		Jumlah pelatihan kompetensi yang di ikuti	20 JP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	15.665.950,-	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.666.350,-	
- Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	7.666.350,-	
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.999.600,-	
- Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	7.999.600,-	
2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	145.175.850,-	
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	145.175.850,-	
- Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	145.175.850,-	
3 Program Riset dan Inovasi Daerah	69.098.700,-	
Invensi dan Inovasi	69.098.700,-	
- Sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	69.098.700,-	
TOTAL	229.940.500,-	

Payakumbuh, Januari 2026

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001

**KEPALA BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN EVALUASI**



HAFIZA, S.Si, ME
NIP. 19860310 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DASATRY DWI RAMADONA, SE, M.M**

Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HAFIZA, S.Si, M.E**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK KEDUA

HAFIZA, S.Si, M.E

NIP. 19860310 200901 2 002

PIHAK PERTAMA

DASATRY DWI RAMADONA, SE. MM

NIP. 19780813 20081 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Fungsional Perencana Muda
BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengkoordinasikan dan Menyusun bahan koordinasi terkait tugas selaku PIC Perangkat Daerah dalam urusan kelitbangan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi dan diverifikasi dokumen inovasinya sesuai standar teknis (selaku PIC)	1 PD
2	Mengkoordinasikan dan Menyusun bahan koordinasi terkait tugas selaku PIC Perangkat Daerah dalam urusan perencanaan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi dan diverifikasi dokumen perencanaannya sesuai standar teknis (selaku PIC)	1 PD
3	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan KAK dan aturan yang berlaku	Persentase serapan anggaran (kinerja PPTK)	90%
		Jumlah pelatihan kompetensi yang di ikuti	20 JP
4	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kebijakan di Kota Payakumbuh	1 Penelitian
		Jumlah pelaksanaan rapat dan koordinasi sub substansi penelitian dan pengembangan	3 rapat

SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	145.175.850,-	

PIHAK KEDUA

HAFIZA, S.Si, M.E

NIP. 19860310 200901 2 002

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

DASATRY DWI RAMADONA, SE. MM

NIP.19780813 20081 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GELVI, S.Si, MM**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HAFIZA, S.Si, ME**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI**
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini yang nanti diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

HAFIZA, S.Si, ME

NIP. 19860310 200901 2 002

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

GELVI, S.Si, MM

NIP. 19830813 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan bagian pengendalian dan evaluasi	Persentase PD dengan capaian kinerja diatas 90%	90%
		Jumlah bahan rapat lingkup pengendalian dan evaluasi yang disusun	8 kali
2.	Terlaksananya asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi dan diverifikasi dokumen perencanaannya sesuai standar teknis (selaku PIC)	1 Perangkat Daerah
3.	Terlaksananya asistensi dan verifikasi dokumen inovasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi dan diverifikasi dokumen inovasinya sesuai standar teknis (selaku PIC)	1 Perangkat Daerah
4.	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan KAK dan sesuai aturan.	Persentase serapan anggaran (khusus PPTK)	90 %
		Jumlah Pelatihan Kompetensi yang diikuti	20 Jam

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7.666.350,-	
2. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	7.999.600,-	

**KEPALA BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN EVALUASI**



HAFIZA, S.Si, ME
NIP. 19860310 200901 2 002

Payakumbuh, Januari 2026
**FUNGSIONAL PERENCANA
AHLI MUDA**



GELVI, S.Si, MM
NIP. 19830813 200901 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROBBY HAFANOS, S.IP, M.CIO**
Jabatan : **FUNGSIONAL PENELITI AHLI MUDA**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HAFIZA, S.Si, ME**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI**
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini yang nanti diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

HAFIZA, S.Si, ME

NIP. 19860310 200901 2 002

Payakumbuh, Januari 2026

PIHAK PERTAMA

ROBBY HAFANOS, S.IP, M.CIO

NIP. 19810208 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Tersusunnya laporan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait inovasi dan teknologi daerah	Jumlah laporan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait inovasi dan teknologi daerah	2 Laporan
2.	Terlaksananya Rapat koordinasi sub substansi penyelenggaraan Inovasi Pemerintah Daerah dan Teknologi daerah	Jumlah pelaksanaan rapat dan koordinasi sub substansi inovasi dan teknologi daerah	3 Kali
3.	Terlaksananya asistensi dan verifikasi dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sebagai PIC)	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi dan diverifikasi dokumen perencanaannya sesuai standar teknis (selaku PIC)	31 OPD
4.	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan KAK dan aturan	Persentase serapan anggaran (kinerja PPTK)	90 %
		Jumlah pelatihan kompetensi yang di ikuti	20 Jam

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah Tahun 2026.	69.098.700,-	

**KEPALA BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN EVALUASI**



HAFIZA, S.Si, ME
NIP. 19860310 200901 2 002

Payakumbuh, Januari 2026
**FUNGSIONAL PENELITI
AHLI MUDA**



ROBBY HAFANOS, S.IP, M.CIO
NIP. 19810208 200604 1 015



EMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

INSPEKTORAT

Jl. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
Email: inspektoratpyk@gmail.com

Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

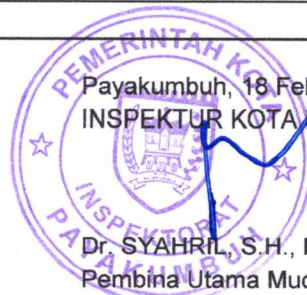
Payakumbuh, 18 Februari 2026
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH



Dr. SYAHRIL, S.H., M.H., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 199703 1 004

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7 LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10 IKU dan IK telah SMART	√



Payakumbuh, 18 Februari 2026
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
 Dr. SYAHRI, S.H., M.H., CGCAE.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700405 199703 1 004